

**PENGARUH PAJAK DEARAH, RETRIBUSI DAERAH, LABA BADAN
USAHA MILIK DAERAH (BUMD), DAN BELANJA MODAL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

**TIWI MEI LISTYOWATI
NIM. 16.52.21.014**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, LABA BADAN USAHA
MILIK DAERAH (BUMD), DAN BELANJA MODAL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh:

Tiwi Mei Listyowati

NIM: 16.52.21.014

Surakarta, 13 April 2023

Disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.

NIP. 198410082014032005

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : TIWI MEI LISTYOWATI

NIM : 16.52.21.014

PRODI : AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD), DAN BELANJA MODAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)". Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 13 April 2023



Tiwi Mei Listyowati

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : TIWI MEI LISTYOWATI

NIM : 16.52.21.014

PRODI : AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian saya yang berjudul "PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD), DAN BELANJA MODAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)".

Dengan ini saya menyaakan bahwa saya telah benar-benar melakukan penelitian dan pengambilan data sekunder dari web resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 13 April 2023



Tiwi Mei Listyowati

Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Sdr: Tiwi Mei Listyowati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Tiwi Mei Listyowati NIM: 16.52.21.014 yang berjudul :

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD), DAN BELANJA MODAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) dalam bidang Ilmu Akuntansi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, Atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 April 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.

NIP. 198410082014032005

PENGESAHAN

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, LABA BADAN
USAHA MILIK DAERAH (BUMD), DAN BELANJA MODAL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

Oleh :

TIWI MEI LISTYOWATI
NIM 16.52.2.1.014

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 M / 11 Syawal 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dewan Penguji :

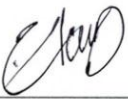
Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Devi Narulitasari, M. Si.
NIP. 19890717 201903 2 019



Penguji II
Fitri Laela Wijayati, S.E., M.Si.
NIP. 19860625 201403 2 001



Penguji III
Usnan, S.E.I., M.E.I.
NIP. 19850919 201403 1 001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta




Dr. M. Rahmawan Arifin, M. Si.
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Q.S Ar-Rad: 11)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk :

Bapak, Ibu, Adikku, dan Saumi serta teman-temanku tersayang yang selalu mendoakan, memberikan semangat, memberikan dukungan, dan selalu ada disetiap aku membutuhkan.

Untuk saudara-saudara dan sahabat-sahabatku yang selalu mendoakan dan memberi semangat...

Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta

Terimakasih...

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E.I., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si., Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibuku tersayang, serta adik dan suamiku tersayang terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
6. Segenap keluargaku, terimakasih atas doa dan semangat yang telah diberikan.
7. Sahabat-sahabatku dan teman-teman yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis. Khususnya Septi Murdiyanti, Ika Novita, Indah Nur dan lainnya.
8. Keluarga besar Akuntansi Syariah A 2016 yang telah menemani berjuang selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
9. Kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang telah membantu penulis menyediakan data dan informasi tentang Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya, Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 April 2023

Penulis

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of local taxes, regional levies, profits of regionally owned enterprises, and capital expenditures on regional original income in district/city governments in Central Java Province in 2019-2021. The sampling technique uses nonprobability sampling. The sample used was 35 district and city governments in Central Java Province with 105 data. The data analysis technique used in this study is panel data regression.

This type of research is quantitative research. The variables in this study are Local Own Revenue, Regional Retribution, BUMD Profits, and Capital Expenditures. The data used is secondary data with data collection techniques using documentation.

The result of the study show that local taxes have a positive effect on regional original income. Regional levies have no effect on local revenue. Profits from regionally owned enterprises have a positive effect on local revenue. Capital expenditure has a negative effect on local revenue.

Keywords : Regional Own Revenue, Regional Taxes, Regional Levies, BUMD Profits, Capital Expenditures

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, dan belanja modal terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *nonprobability sampling*. Sampel yang digunakan sebanyak 35 pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan 105 data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Belanja Modal. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Laba atas badan usaha milik daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Belanja Modal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
<i>ABSTARCT</i>	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR GRAFIK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Identifikasi Masalah	6
Batasan Masalah.....	6
Rumusan Masalah	7
Tujuan Penelitian.....	7
Manfaat Penelitian.....	8

Jadwal Penelitian	8
Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
Kajian Teori.....	11
Stakeholder Teori	11
Pendapatan Asli Daerah	12
Pajak Daerah.....	14
Retribusi Daerah.....	16
Perbedaan Pajak Daerah dengan Retribusi Daerah	18
Laba Badan Usaha Milik Daerah	19
Belanja Modal	20
Hasil Penelitian yang Relevan.....	21
Kerangka Berpikir	29
Perumusan Hipotesis	31
Pengaruh Pajak Daerah terhadapPendapatan asli Daerah	31
Pengaruh Retribusi Daerah terhadapPendapatan asli Daerah	32
Pengaruh Laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	33
Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
Waktu dan Wilayah Penelitian	35

Jenis Penelitian	35
Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	35
Populasi	35
Sampel	36
Teknik Pengambilan Keputusan.....	36
Data dan Sumber Data	37
Teknik Pengumpulan Data	37
Variabel Penelitian	38
Variabel Dependen	38
Variabel Independen.....	38
Definisi Operasional Variabel	39
Pajak Daerah.....	39
Retribusi Daerah.....	39
Laba Badan Usaha Milik Daerah	40
Belanja Modal	40
Teknik Analisis Data	43
Analisis Statistik Deskriptif.....	44
Pemilihan Model Estimasi Data Panel	44
Uji Kesesuaian Model	47
Uji Asumsi Klasik	47
Analisis Model Regresi Panel	50
Uji Ketepatan Model	51
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	53
Gambaran Umum Penelitian	53

Pengujian dan Hasil Analisis Data	55
Analisis Statistik Deskriptif.....	56
Uji Pemilihan Regresi Data Panel	59
Uji Asumsi Klasik	60
Uji Ketepatan Model	67
Analisis Hasil Uji Regresi Data Panel	68
Hasil Uji Hipotesis.....	69
Pembahasan Hasil Analisis Data	72
Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah .	72
Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	73
Pengaruh Laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	74
Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah	76
BAB V PENUTUP	78
Kesimpulan.....	78
Keterbatasan Penelitian	79
Saran-saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

1.1. PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021	5
2.1. Pengelompokan Retribusi Daerah	17
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan	22
2.3. Kerangka Berfikir	30
3.1. Definisi Operasional Variabel	41
3.2. Pengambilan Keputusan pada Autokorelasi	50
4.1. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	55
4.2. Statistik Deskriptif	56
4.3. Hasil Uji Chow	59
4.4. Hasil Uji Haussman	59
4.5. Hasil Uji Multikolinieritas	62
4.6. Hasil Uji Multikolinieritas Setelah Logaritma	63
4.7. Hasil Uji Heteroskedastisitas	64
4.8. Hasil Uji Heteroskedastisitas Setelah Logaritma	65
4.9. Hasil Uji F	67
4.10. Hasil Uji Koefisien Determinasi	68
4.11. Hasil Uji Hipotesis	70

DAFTAR GAMBAR

4.1. Hasil Uji Normalitas.....	60
4.2. Hasil Uji Normalitas setelah Log	61

DAFTAR GRAFIK

4.1. Hasil Uji heteroskedastisitas.....	66
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah tentunya memerlukan anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Pemerintah juga memerlukan anggaran untuk melaksanakan pembiayaan untuk memperbaiki suatu negara agar lebih berkembang. Dalam menjalankan suatu anggaran tentunya pemerintah memerlukan suatu bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah dapat menggunakan akuntansi pemerintahan untuk dapat menjalankan anggaran sehingga bisa merealisasikannya dengan baik. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang dihadapi oleh pemerintah menjadikan akuntansi pemerintah sebagai suatu yang penting untuk memenuhi kebutuhan. (Nordiawan dkk:2009)

Sistem pemerintahan di Indonesia yang dulunya menggunakan sistem sentralisasi sekarang di ubah menjadi desentralisasi yang diubah sejak tahun 2001. Perubahan yang dilakukan Pemerintah memberikan Pemerintah daerah kekuasaan untuk mengurus dan menggali sendiri potensi yang berada di daerah tersebut. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 (dalam Nordiawan dkk:2009) tentang pemerintah daerah pasal 155, belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah didanai dari dan atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jadi dalam hal ini dapat di ketahui bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri dengan menggunakan dana pemasukan dari pendapatan asli daerah (PAD) tersebut.

Lahirnya Undang – Undang (UU) No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang sekarang di revisi menjadi Undang – Undang (UU) No 32 Tahun 2004 karena UU No 22 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan politik serta ketatanegaraan. Terdapat dua masalah penting dalam sistem desentralisasi di Indonesia. Yang pertama, penyebaran dan pelimpahan kekuasaan pemerintah ke segenap daerah negara. Yang kedua, Penyerasian perbedaan – perbedaan yang ada di antara daerah – daerah, pemenuhan aspirasi – aspirasi dan tuntutan daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang yang telah direvisi memberikan dasar yang menandakan penetapan pemberian kewenangan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab serta mendorong kemandirian daerah. Otonomi daerah memberikan kesempatan pada daerah untuk berinovasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan.

Salah satu unsur pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal yang berupa mesin-mesin, jalan raya, dan infrastruktur lainnya. Belanja modal merupakan pengeluaran yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya dapat meningkatkan biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2009). Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin-mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan serta aset tetap lainnya. Aset tetap yang dimiliki merupakan salah satu akibat adanya belanja modal yang menjadi prasyarat utama dalam memberikan pelayanan public oleh pemerintah daerah. Dalam upaya menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas umum. Belanja modal yang besar menggambarkan bahwa terdapat banyaknya infrastruktur dan sarana yang di bangun oleh pemerintah daerah tersebut.

Pada suatu daerah biasa mencapai pertumbuhan ekonomi secara terus menerus dengan cara memperbaiki infrastruktur yang ada pada daerah tersebut. Dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah yang khususnya terdapat pada belanja modal diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan pendapatan perkapita. Selain hal tersebut, peningkatan belanja modal diharapkan untuk

bias menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga bias meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan dapat dikembangkannya pembangunan dengan sumber alokasi modal diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam hal keuangan. Untuk mengetahui perkembangan dalam suatu daerah dapat di lihat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut sebagai tolak ukur . Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen yang penting yang dapat menggambarkan bahwa daerah tersebut dapat membiayai daerahnya sendiri.

Mengetahui bahwa Provinsi Jawa Tengah terdiri dari berbagai Kabupaten/Kota dan dari setiap daerah mempunyai potensi-potensi tersendiri untuk dapat meningkatkan PAD pada daerah tersebut. Meningkatnya PAD di Jawa Tengah dapat dipengaruhi oleh beberapa komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan laba badan usaha milik daerah (BUMD). Dengan meningkatnya komponen-komponen tersebut maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Apabila PAD meningkat maka suatu daerah dapat meningkatkan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur sebagai fasilitas umum untuk bisa dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut.

Pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1

PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021

	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	
PAD	2019	27.422,03 M	28.648,04 M	104,47%
	2020	30.866,98 M	28.056,37 M	90,89%
	2021	29.538,30 M	31.611,20 M	107,02%

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 dalam realisasinya sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Realisasi yang dapat dicapai sebesar 104,47 persen atau sebesar Rp. 28.648,04 miliar dari anggaran yang dipatok sebesar Rp. 27.422,03 miliar. Namun, PAD di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp. 28.056,37 miliar dari anggaran yang dipatok sebesar Rp. 30.866,98 miliar. Realisasi yang tercapai sebesar 90,89 persen. Dalam hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan realisasi sebesar 13,58 persen dari tahun 2019.

Dengan latar belakang diatas maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah (BUMD), dan belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan judul “ **Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba atas Bdan Usaha Milik Daerah**

(BUMD), dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari otonomi daerah yaitu kemandirian daerah, namun rasio kemandirian pemerintah di pulau Jawa masih rendah, walaupun nilai PAD yang dimiliki lebih tinggi jika dibandingkan pulau lain.
2. Pendanaan pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat dilihat dari dana perimbangan yang lebih besar nilainya jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah mencerminkan pemerintah daerah di Indonesia belum mandiri.
3. Masih adanya perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini memfokuskan pada faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah berupa desentralisasi fiskal. Dari sisi pengeluaran daerah berupa belanja modal serta dari segi pendapatan berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba atas

badan usaha milik daerah.

2. Kemandirian daerah ditinjau dari desentralisasi fiskal, belanja modal dan pajak daerah yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran.
3. Studi empiris pada penelitian ini pada seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah pada tahun 2019 – 2021.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini meliputi:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah?
3. Apakah laba atas badan usaha milik daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah?
4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah;
2. Untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah;

3. Untuk menganalisis pengaruh laba atas badan usaha milik daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah;
4. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat terhadap pihak yang bersangkutan yaitu

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pendapatan asli daerah dan dapat di jadikan untuk menambah pengetahuan tentang pendapatan asli daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk pemerintah daerah dalam mengambil keputusan untuk perkembangan masing-masing daerah.

1.7 Jadwal Penelitian

(Terlampir)

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam proposal skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penelitian atau masalah yang diangkat, identifikasi masalah yang berisikan kajian berbagai masalah yang relevan, batasan masalah yang berisikan fokus masalah, rumusan masalah yang berisikan inti yang akan dikaji peneliti, tujuan penelitian yang berisikan sasaran yang akan di dicapai peneliti, manfaat penelitian yang berisikan manfaat dari hasil penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teori yang menjelaskan teori yang menjelaskan permasalahan. Selain berisikan landasan teori pada bab ini juga berisikan hasil penelitian yang relevan. Pada bab ini juga akan ditemukan kerangka berpikir dan hipotesis yang merupakan dugaan jawaban dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai penelitian yang peneliti lakukan. Didalamnya terdapat waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, definisi operasional variabel, instrumen penelitian serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai gambaran umum penelitian dan hasil pengujian. Pada bab ini juga berisikan mengenai hasil analisis data

penelitian yang telah dilakukan dengan metode penelitian yang telah ditentukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian atau pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu bab ini berisi saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Stakeholder Teori

Stakeholder theory didefinisikan sebagai perusahaan bukan hanya entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri tetapi juga harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Jadi keberadaan perusahaan juga dipengaruhi oleh stakeholdernya.

Pada sector publik rencana anggaran dipublikasikan secara terbuka untuk dikritik dan di diskusikan. Ini berarti bahwa Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan juga dipengaruhi dan harus mengutamakan kepentingan rakyat selaku *stakeholder* (Ghozali dan Chariri, 2014). *Stakeholder* sektor publik lebih beragam jika dibandingkan dengan sektor swasta. *Stakeholder* sektor publik dibagi menjadi dua yaitu *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal (Mardiasmo, 2009). *Stakeholder* internal meliputi lembaga negara (DPR dan MPR), kelompok politik, manajer publik (gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD), serta pegawai pemerintah. Sedangkan *stakeholder* eksternal yaitu masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, bank kreditor pemerintah, badan internasional seperti bank dunia, investor asing, generasi yang akan datang dan perusahaan ataupun organisasi yang menggunakan pelayanan sektor publik.

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah, serta aset daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan diperjelas pasal 1 ayat 28 menyebutkan pendapatan asli daerah yaitu : “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan”. Sedangkan menurut PP RI No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siahaan, 2005). Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah ini mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD nya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah.

Tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat disuatu daerah merupakan

cerminan dari pendapatan asli daerah, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan asli daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama dalam memaksimalkan PAD.

Menurut Suriadinata (1994: 103) untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggung jawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor-faktor, antara lain :

1. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya.
2. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih.

3. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan.
4. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan.
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar.
6. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.

2.1.2 Pajak Daerah

Pengertian pajak secara umum adalah pungutan yang diambil dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2005: 7). Hal ini dapat menjamin bahwa dalam kas negara selalu berisi uang hasil pajak. Penerimaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin keadilan atau kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan pengertian antara pajak negara dan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya. Perbedaan yang ada hanya pada aparat pemungut, dasar pemungutan, dan penggunaan pajak. Dalam lingkungan daerah, yang disebut dengan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan

hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Terdapat ciri-ciri yang menyertai pajak itu sendiri (Siahaan, 2005). Dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah.
4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra dari Negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

Dalam ketentuannya, suatu daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditetapkan baik pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota. Jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten atau kota otonom, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten atau kota.

2.1.3 Retribusi Daerah

Secara umum, penertian retribusi adalah pembayaran yang wajib dari penduduk yang diberikan kepada negara karena adanya suatu jasa tertentu yang diberikan oleh negara untuk penduduknya secara perorangan. Dalam lingkup daerah, retribusi daerah dapat diartikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi ataupun badan (Siahaan, 2005: 5).

Jenis retribusi daerah secara umum dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan untuk melindungi kepentingan umum dan menjagakelestarian lingkungan.

Dari jenis-jenis retribusi tersebut, jenis-jenis retribusi daerah dapat

dikelompokkan menjadi:

Table 2.1

Pengelompokan Retribusi Daerah

No	Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Retribusi mendirikan bangunan
2	Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Retribusi pasar grosir/pertokoan	Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
3	Retribusi penggantian biaya cetak KTP dancatatan sipil	Retribusi tempat pelelangan	Retribusi Izin gangguan
4	Retribusi pelayanan pemakaman	Retribusi terminal	Retribusi izin trayek
5	Retribusi parkir di tepi jalan umum	Retribusi tempat khusus parkir	
6	Retribusi pelayanan pasar	Retribusi tempat penginapan	
7	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	Retribusi penyedotan kakus	
8	Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	Retribusi rumah potong hewan	
9	Retribusi penggantian biaya cetak peta	Retribusi pelayanan pelabuhan kapal	
10	Retribusi pengujian kapal perikanan	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	
11		Retribusi penyebrangan di atas air	
12		Retribusi pengolahan limbah cair	

Sumber : (Siahaan, 2005)

Penetapan jenis retribusi kedalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan peraturan pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di daerah yang bersangkutan. Demikian pula untuk jenis retribusi perizinan tertentu juga ditetapkan dengan peraturan pemerintah karena perizinan tersebut walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan instansi- instansi terkait.

Jasa yang menjadi objek retribusi hanyalah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara langsung. Apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintah daerah, tetapi tidak secara langsung, misalnya oleh BUMD, jasa tersebut tidak dikenakan retribusi (Siahaan, 2005: 437).

2.1.4 Perbedaan Pajak Daerah dengan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah secara garis besar mempunyai pengertian yang sama, yaitu pungutan yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Akan tetapi terdapat perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah. Siahaan (2005: 10) menjelaskan perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

1. Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
2. Balas jasa pemerintah. Pada pajak daerah balas jasa yang diberikan oleh pemerintah berlaku untuk umum, baik bagi yang membayar pajak

maupun yang dibebaskan dari pajak. Sedangkan retribusi, balas jasanya hanya dapat dinikmati bagi yang membayar retribusi.

3. Sifat pemungutnya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk seluruh masyarakat yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sedangkan retribusi sifat pemungutannya hanya terbatas pada orang yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah.
4. Sifat pelaksanaannya. Pajak mempunyai sifat mengikat atau memaksa, itu berarti jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi. Sedangkan retribusi bersifat ekonomis, yang berarti hanya orang yang ingin mendapat balas jasa dari pemerintah harus membayar retribusi.
5. Lembaga pemungutnya. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sedangkan retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah.

2.1.5 Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk oleh Pemda berdasarkan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1974 yang terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan (Bank Pembangunan Daerah dan Bank Pasar) dan usaha seperti penyediaan air bersih (PDAM), jasa sektor industri pertanian, perkebunan dan lain-lain.

Pada dasarnya BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh daerah, tetapi dalam melaksanakan kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari

pemerintah daerah. Oleh karena itu, jasa yang diberikan oleh BUMD bukanlah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sehingga bebas dari pungutan pemerintah daerah. Namun apabila BUMD memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, maka BUMD wajib membayar pungutan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Siahaan, 2005: 437).

Pendirian BUMD bertujuan untuk menambah penghasilan daerah, penyediaan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan pelayanan / kepentingan umum dan memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah. Secara khusus pendirian perusahaan daerah bagi pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap PAD.

Mengenai pendapatan hasil perusahaan daerah, disebutkan bahwa daerah-daerah otonom dapat mendirikan perusahaan-perusahaan yang menguntungkan daerah dan memenuhi kewajiban sosial.

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan BUMD antara lain keterbatasan modal, campur tangan birokrat yang berlebihan, status badan hukum yang tidak jelas dan minimnya SDM yang berkualitas/profesional. Padahal keempat unsur tersebut sangat penting dalam upaya peningkatan dan pengembangan BUMD.

2.1.6 Belanja Modal

Menurut PSAP Nomor 02, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk

perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender (PP Nomor 71, 2010).

Sedangkan menurut Halim (2004:73), Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Belanja modal berperan dalam memberikan pelayanan kepada publik yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk menambah aset tetap, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana ke dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan yaitu hasil penelitian yang sebelumnya yang digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran mengenai penelitian ini. Penelitian yang dikaji meliputi :

Tabel 2.2

Hasil Penelitian yang Relevan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kusuma dan Wirawati (2013)	Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Bali	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil statistik menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam peningkatan PAD Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan untuk retribusi daerah hanya 16,6% kontribusinya terhadap PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

2	Mentayani,dkk (2014)	Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten dan kota di provinsi kalimantan Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2007 – 2011.
3	Ririn (2014)	Pengaruh belanja modal, investasi, dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah	Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi di Indonesia periode 2010-2012.

4	Putri Dan Rahayu (2015)	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli Daerah (PAD) di Kabupaten Cirebon	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara parsial Pajak Daerah dan retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5	Mabe dan Kuusaana (2015)	Pengaruh pajak properti terhadap infrastruktur dan layanan perkotaan di Ghana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak properti mampu meningkatkan pendapatan daerah dan dapat digunakan untuk membangun layanan masyarakat.
6	Saleh (2015)	Analisis pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Tengah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maluku Tengah selama tahun 2008-2012 cenderung menurun dari tahun ke tahun, dengan sumber penerimaan PAD terbesar berasal dari komponen PAD yang Sah Lainnya, diikuti oleh penerimaan Pajak Daerah,

			Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
7	Marita dan Suardana (2016)	Pengaruh pajak daerah pada pendapatan asli daerah di Kota Denpasar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Realisasi penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Denpasar tahun 2009-2013.
8	Sunarto dan Fatimah (2016)	Pengaruh penerimaan retribusi dan penetapan tarif obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gunung Kidul	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara parsial Penerimaan Retribusi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penetapan Tarif Obyek Wisata secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

9	Zahari (2016)	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sarolangun	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sarolangun periode 2010-2015.
10	Amrozi (2016)	Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening (Studi kasus pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013

11	Ardiyan Natoen (2018)	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Selatan periode 2001-2015 dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Selatan periode 2001-2015
12	Maya Novitasari (2019)	Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah mempunyai pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2017. Retribusi Daerah mempunyai pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2017. Belanja Modal mempunyai pengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2017

13	Vika Saputri (2019)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Utara dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Utara.
14	Wulan Purnama Sari (2019)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017.
15	Lilik Handayani (2020)	Analysis of potential local goverment revenue sources towards B local	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapata asli daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan

		government revenue (PAD) of Balikpapan	asli daerah di Balikpapan
16	Sri Amelia Rizki (2021)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lima Puluh Kota.
17	Eka Meiliya (2022)	Pengaruh Pajak Daerah, Laba BUMD terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

2.3 kerangka Berpikir

Dalam keuangan daerah sebenarnya hanya terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Didalam penerimaan daerah terdapat pendapatan asli daerah yang dipengaruhi oleh pajak daerah, retribusi daerah, dan laba atas

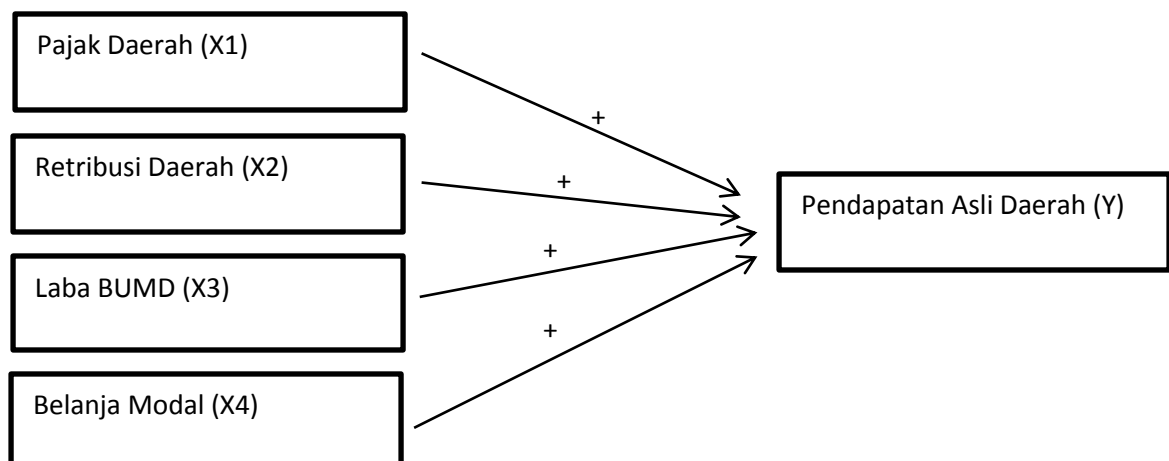
badan usaha milik daerah (BUMD).

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan laba atas badan usaha milik daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan suatu hal yang penting karena dapat digunakan untuk pembiayaan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dan dapat pula dijadikan sebagai pembangunan daerah.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan pajak daerah dan retribusi daerah yang mengacu pada penelitian wirawati dan kusuma (2013). Sedangkan variabel laba atas badan usaha milik daerah mengacu pada penelitian sugiarto (2016). Penelitian ini menggunakan data laporan realisasi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten yang berada di Karesidenan Surakarta selama 5 tahun, yakni 2015-2019.

Table 2.3

Kerangka Berfikir



2.4 perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu melakukan perluasan objek pajak daerah serta ditentukan dalam menentukan besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan (Samudra, 2015).

Dalam hal ini, pajak daerah bisa menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Adanya keterkaitan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu terdapat pada kepentingan yang sama yang dimiliki oleh para *stakeholder*. Menurut Ghozali dan Chariri (2014), *stakeholder* merupakan suatu kelompok maupun individu yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses untuk pencapaian tujuan dalam organisasi. *Stakeholder* dalam sektor publik dibagi menjadi dua yaitu *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal (Mardiasmo, 2009). Dalam hal ini, *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal saling mempengaruhi dalam mencapai kemandirian daerah. Peraturan tersebut dapat menjelaskan bahwa *stakeholder teori* dapat memberikan pengaruh terhadap pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan kemandirian daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah.

Hal ini konsisten dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013), Rahayu (2015), Marita dan Suardana (2016), Novitasari (2019), Saputri (2019), dan Sari (2019) bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sumber penerimaan yang dapat digali salah satunya berupa pajak daerah yang merupakan andalan bagi daerah dan diharapkan dari sumber penerimaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan asli daerah (Fitriana, 2014 : 1884). Semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah, semakin rendah penerimaan pajak daerah maka akan menurunkan pendapatan asli daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2009) yang dikategorikan sebagai *stakeholder* eksternal yaitu masyarakat sebagai pengguna jasa publik dan yang dikategorikan sebagai *stakeholder* internal yaitu pemerintah daerah atau manajer publik. *Stakeholder teori* didefinisikan sebagai perusahaan bukan hanya entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri tetapi juga harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi daerah dari masyarakat yang menggunakan jasa publik dikontribusikan sebagai pendapatan asli daerah yang dapat digunakan

untuk melakukan pembangunan bersama.

Hal ini sejalan dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013), Mentayani,dkk (2014), Putri Dan Rahayu(2015), Sunarto dan Fatimah (2016), Novitasari (2019), dan Sari (2019) bahwa dalam penerimaan retribusi daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Semakin besarnya jumlah penerimaan Retribusi Daerah maka jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga semakin meningkat. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H2 : Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

2.4.3 Pengaruh Laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Ghozali dan Chariri (2014) *stakeholder teori* menyatakan bahwa perusahaan bukan hanya entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri tetapi juga harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Sehingga dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dari hasil sebagai pelayan publik. Dengan demikian, suatu organisasi pemerintahan membutuhkan *stakeholder* untuk bisa meningkatkan kemandirian suatu daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Meiliya (2022) bahwa laba badan usaha milik daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Semakin besarnya laba yang dihasilkan oleh BUMD, maka akan menaikkan pendapatan asli daerah. Maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah:

H3: Laba badan usaha milik daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

2.4.4 Pengaruh belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Belanja Modal merupakan anggaran yang dikeluarkan untuk dapat memperoleh aset tetap dan atau aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Siregar, 2014:167).

Menurut Ghozali dan Chariri (2014) teori *stakeholder* menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta aset daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, suatu organisasi pemerintahan memberikan fasilitas umum untuk bisa dimanfaatkan oleh stakeholdernya. Dalam mewujudkan kesejahteraan, suatu organisasi pemerintahan membutuhkan peran *stakeholder* untuk bisa menggunakan jasa publik yang hasilnya dikontribusikan untuk pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian Amrozi (2016) , hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013. Semakin besar belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan semakin meningkat. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu penelitian di laksanakan sejak bulan oktober 2019 sampai maret 2023. Di mulai dari menyusun usulan penelitian hingga terlaksananya penelitian hingga penyusunan hasil penelitian. Sedangkan wilayah penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran 2019-2021.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena meneliti populasi atau sampel tertentu untuk menguji hipotesis yang menjadi tujuan dalam penelitian. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini tergolong penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang mencari adanya pengaruh atau hubungan antara variable-variabel dalam penelitian tersebut (Sugiyono, 2017).

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah suatu kumpulan obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diberikan kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Jadi populasi itu bukan hanya orang saja tetapi bisa

juga benda ataupun obyek lain. Corper, Donald, R; Schindler, Pamela S; 2003 dalam Sugiyono 2017 menyatakan bahwa “*Population is the total collection of element about which we wish make some inference...A population element is the subject on which the measurement is being taken. It is the unit of study*”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2021. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 35 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil berdasarkan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2017). Sampel yang diambil dalam penelitian harus sesuai dengan populasi. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 Pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* merupakan teknik yang digunakan dengan tidak memberikan kesempatan terhadap anggota dalam populasi untuk bisa menjadi

sampel. teknik *nonprobability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh*.

Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel yang akan digunakan apabila semua sampel berasal dari semua anggota (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini menggunakan semua pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah diolah oleh pihak pengumpul data primer dan dengan studi pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan dianalisis, disajikan dalam bentuk informasi. (Sugiyono, 2017). Data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada www.djpk.kemenkeu.go.id.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan dalam teknik dokumentasi bias menggunakan data dari hasil penelitian lain atau dari informasi yang diperoleh peneliti sendiri atau dari orang lain (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Berdasarkan sumber data yang diperoleh berupa ringkasan laporan keuangan tahunan seluruh Kabupaten/Kota.

3.6 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk menarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini terdiri dari lima variabel penelitian yang terdiri atas satu variabel dependen dan empat variabel independen yaitu sebagai berikut:

3.6.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variable yang dipengaruhi karena adanya variable bebas atau variable independen (Sugiyono, 2017). Variabel dependen atau yang sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia, variabel dependen sering disebut dengan variabel terikat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD).

3.6.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variable bebas adalah variable yang mempengaruhi atau variable yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variable dependen atau variable terikat (Sugiyono, 2017). Variabel independen dalam penelitian ini adalah faktor yang dapat

mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). Variabel independen pada penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, laba atas badan usaha milik daerah (laba BUMD), dan belanja modal.

3.7 Definisi Operasional Variabel

3.7.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang diambil dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa dan dapat terutang oleh wajib pajak dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2005). Dalam penelitian ini, teknik pengukuran yang digunakan untuk pajak daerah adalah berdasarkan data yang telah diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada www.djpk.kemenkeu.go.id.

3.7.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara kepada penduduknya secara perorangan (Siahaan, 2005). Dalam penelitian ini variabel retribusi daerah diperoleh dari data yang telah diperoleh dari

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada www.djpk.kemenkeu.go.id.

3.7.3 Laba Badan Usaha Milik Daerah

Pada dasarnya laba BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh daerah, tetapi dalam melaksanakan kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari pemerintah daerah (Siahaan, 2005). Dalam penelitian ini, pengukuran variabel laba BUMD diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada www.djpk.kemenkeu.go.id.

3.7.4 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan suatu aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang termasuk dalam belanja modal antara lain tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud lainnya. Dalam penelitian ini, teknik pengukuran yang digunakan untuk belanja modal adalah berdasarkan data yang telah diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal kabupaten/kota se-Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2019-2021. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada www.djpk.kemenkeu.go.id.

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

No	Nama Variabel	Definisi	Pengukuran
1	Pajak Daerah (X1)	Pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Siahaan,	$\frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} 100\%$ <p>Sumber : Novitasari (2018)</p>

		2005)	
2	Retribusi Daerah (X2)	Pembayaran wajib bagi masyarakat kepada Negara karena adanya jasa yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat secara perorangan. (Siahaan, 2005)	$\frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} 100\%$ <p>Sumber : Novitasari (2018)</p>
3	Laba Badan Usaha Milik Daerah (X3)	Badan usaha yang dimiliki oleh daerah, tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari pemerintah daerah. (Siahaan, 2005)	$\frac{\text{Laba BUMD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} 100\%$ <p>Sumber : Novitasari (2018)</p>
4	Belanja Modal (X4)	Pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari periode akuntansi. (Halim, 2012)	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} 100\%$ <p>Sumber : Novitasari (2018)</p>
5	Pendapatan Asli	Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} 100\%$

	Daerah (Y)	berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang- undangan. (Siahaan, 2005)	Sumber : Novitasari (2018)
--	---------------	---	----------------------------

3.8 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Metode estimasi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yang meliputi: *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Adapun fungsi estimasi data panel adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it}$$

Kemudian fungsi tersebut dibentuk sebagai model ekonometrika dengan spesifikasi model sebagai berikut:

$$PAD_{it} = \alpha + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 RD_{it} + \beta_3 LBUMD_{it} + \beta_4 BMD_{it} + e_{it}$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

RD = Retribusi Daerah

PD = Pajak Daerah

LBUMD = Laba BUMD

BMD = Belanja Modal

α = Intercept/konstanta

β = Koefisien Regresie

e = Term of Error.

i = Cross Section

$t = \textit{Time Series}$

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, perhitungan nilai minimum, maksimum, penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi (Sugiyono, 2017). Analisis data dengan deskriptif terdiri dari data yang disajikan melalui grafik, tabel, frekuensi, persentase, perhitungan mean, median, dan modus.

3.8.2 Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Pemilihan model estimasi data panel terdiri dari tiga jenis model yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

1. *Common Effect Model* (CEM)

Model *Common Effect* merupakan model estimasi yang menggabungkan data pada *time series* dan data pada *cross section*. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini diasumsikan bahwa perilaku data antar Kanupaten/kota sama

dalam berbagai kurun waktu (Widarjono, 2013). Bentuk persamaan pada model *common effect* sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it} \dots\dots$$

Keterangan:

Y = variable dependen

X = variable independen

i= cross section

t = time series

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Model *fixed effect* mengasumsikan bahwa *slope* (koefisien regresi) tetap antar ruang dan waktu. Estimasi model *fixed effect* dapat dilakukan dengan menggunakan *dummy* untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model estimasi ini disebut juga dengan *Least Squares Dummy Variable* (Widarjono, 2013). Model *fixed effect* dengan menggunakan teknik variabel *dummy* sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1i} + \beta_4 D_{2i} + \dots + e_{it}$$

Keterangan:

D = *dummy*

3. *Random Effect Model* (REM).

Model *random effect* merupakan suatu model estimasi

regresi data panel dengan asumsi koefisien *slope* konstan dan intersep berbeda antar individu dan antar waktu (*random effect*). Variabel *dummy* di dalam model *fixed effect* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Hal ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Penyelesaian dalam masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan yang dikenal dengan metode *random effect*.

Estimasi data panel dalam metode ini menjelaskan bahwa variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Model yang tepat digunakan untuk mengestimasi *random effect* adalah *Generalized Least Square* (GLS) sebagai estimatornya karena dapat meningkatkan efisiensi dan *least square* (Widarjono, 2013). Model dalam *random effect* ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \mu_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it}$$

Keterangan:

α = parameter yang tidak diketahui yang menunjukkan rata - rata intersep populasi;

μ = bersifat random yang menjelaskan adanya perbedaan perilaku kabupaten/kota secara individu

3.8.3 Uji Kesesuaian Model

1. Uji Chow

Pengujian dalam uji chow dilakukan untuk pemilihan antara model CEM dan model FEM. Cara yang digunakan dalam pengujian ini yaitu dengan membandingkan nilai dari hasil probability F dengan signifikan. Apabila nilai dari probability F kurang dari $< 0,05$ ($F < 0,05$), maka model FEM yang lebih tepat digunakan dibandingkan dengan model CEM. Namun, jika nilai dari probability F lebih dari $0,05$ ($F > 0,05$), maka model CEM yang lebih tepat digunakan dibandingkan dengan model FEM.

2. Uji Hausman

Dalam uji hausman pengujian yang tepat dilakukan untuk pemilihan model antara model FEM dan REM. Cara dalam pengujian ini yaitu dengan melihat perbandingan nilai dari probability *chi-square* dengan signifikan. Jika nilai dari probability *chi-square* kurang dari $0,05$ (*chi-square* $< 0,05$) maka model FEM yang lebih tepat dibandingkan model REM. Sedangkan apabila nilai probabilitas *chi-square* lebih dari $0,05$ (*chi-square* $> 0,05$) maka model REM yang lebih tepat dibandingkan model FEM.

3.8.4 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik terhadap model regresi yang digunakan didalam penelitian dilakukan untuk menguji apakah model regresi

tersebut tepat atau tidak. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu uji yang dilakukan untuk dapat mengetahui data yang dipakai berdistribusi normal atau tidak dan dapat dilakukan dengan uji statistik *Jarque- Bera Test*. *Jarque- Bera Test* merupakan uji yang digunakan untuk dapat mengetahui data berdistribusi normal. Data dapat disebut normal jika probabilitasnya lebih besardari 5% atau $> 0,05$ (Winarno, 2015).

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas yaitu uji yang mempunyai sifat jika variable gangguan tidak mempunyai rata-rata nol maka tidak. Tujuan uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. (Natoen: 2018)

Untuk dapat mengetahui hasilnya, dapat dilihat dari hasil grafik yang dihasilkan sebagai berikut :

- a. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

- b. Apabila tidak ada pola yang jelas, seperti pola yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk ada hubungan linier antara variable independen dalam suatu regresi (Widarjono, 2013). Jika koefisien korelasi antara masing-masing variabel independen lebih dari 0,8 ($> 0,8$) maka terjadi multikolinieritas. Sedangkan apabila koefisien korelasi antara masing-masing variabel independen kurang dari 0,8 ($< 0,8$) maka tidak terjadi multikolinieritas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan hubungan antara dirinya sendiri. Uji Autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji dari model regresi apakah terdapat adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat diketahui melalui uji *Durbin Watson* (DW).

Terdapat pengambilan keputusan ada maupun tidaknya autokorelasi(Widarjono, 2013) :

Tabel 3.2

Pengambilan Keputusan pada Autokorelasi

Hipotesis Awal	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dL$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada Keputusan	$dL \leq d \leq dU$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dL < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-dU \leq d \leq 4-dL$
Tidak ada autokorelasi, positif, maupun negatif	Tidak tolak	$dU \leq d \leq 4-dU$

3.8.5 Analisis Model Regresi Data Panel

Teknik analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Serta untuk menunjukkan arah hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen. Pengukuran variabel dependen dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Model persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu:

$$PAD = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 LB + \beta_4 BM + e$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

LB = Laba BUMD

BM = Belanja Modal

α = konstanta

β = koefisien regresi

e = *Standard Error*

3.8.6 Uji Ketepatan Model

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016). Ketentuan yang terdapat dalam uji F yaitu:

- a. Apabila nilai signifikansi dari F lebih kecil dari 0,05 (Sig<0,05) maka model tersebut sudah tepat atau dapat digunakan.
- b. Apabila tingkat signifikansi dari D lebih besar dari 0,05 (Sig>0,05), maka model penelitian tersebut tidak tepat atau tidak dapat digunakan.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi (Ghozali, 2016). *Goodnes-fit* merupakan pengujian sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variabel bebas kepada variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi adalah nol sampai dengan satu. Jika nilai adjusted R^2 menunjukkan nilai yang kecil, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen rendah. Sebaliknya, jika nilai adjusted R^2

mendekati nilai satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.8.7 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis atau uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh hubungan antar variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen) dengan asumsi bahwa variabel yang lain dianggap konstan. Dalam uji t nilai dari t hitung akan dibandingkan dengan t tabel hal tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Jika t hitung lebih kecil dari t tabel atau dapat dikatakan nilai probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikansinya ($\text{sig} < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima ini berarti variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b. Jika t hitung lebih besar dari t tabel atau dapat dikatakan nilai probabilitasnya lebih besar dari tingkat signifikansinya ($\text{sig} > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak ini berarti variabel terikat tidak berpengaruh terhadap variabel bebas.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba atas badan usaha milik daerah (BUMD), dan belanja modal terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Data pada penelitian ini diperoleh dari direktoratjenderal perimbangan keuangan di bawah kementerian keuangan republik Indonesia (djpk.kemenkeu.go.id)

Objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota seluruh Jawa Tengah dengan periode penelitian 3 tahun (2019- 2021). Sehingga sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah 35 pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di wilayah Jawa Tengah dengan total data pengamatan sebanyak 105. Jenis penelitian ini yaitu penelitian data sekunder dengan penyelesaian data diolah menggunakan program Eviews 10.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa. Jawa Tengah mempunyai luas wilayah sebesar 32.548 km persegi atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Berikut adalah 35 Kabupaten/Kota yang terdapat di wilayah Jawa Tengah :

Tabel 4.1

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Jepara	19	Kabupaten Wonogiri
2	Kabupaten Karanganyar	20	Kabupaten Wonosobo
3	Kabupaten Kebumen	21	Kabupaten Banjarnegara
4	Kabupaten Kendal	22	Kabupaten Banyumas
5	Kabupaten Klaten	23	Kabupaten Batang
6	Kabupaten Kudus	24	Kabupaten Blora
7	Kabupaten Magelang	25	Kabupaten Boyolali
8	Kabupaten Pati	26	Kabupaten Brebes
9	Kabupaten Pekalongan	27	Kabupaten Cilacap
10	Kabupaten Pemasang	28	Kabupaten Demak
11	Kabupaten Purbalingga	29	Kabupaten Grobogan
12	Kabupaten Purworejo	30	Kota Magelang
13	Kabupaten Rembang	31	Kota Pekalongan
14	Kabupaten Semarang	32	Kota Salatiga
15	Kabupaten Sragen	33	Kota Semarang
16	Kabupaten Sukoharjo	34	Kota Surakarta
17	Kabupaten Tegal	35	Kota Tegal
18	Kabupaten Temanggung		

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variable dependen, dan pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah (BUMD), serta belanja modal sebagai variable independen. Penelitian ini didasari dengan data normal, bebas multikolinearitas, tidak heteroskedastisitas, dan bebas autokolerasi, namun data diketahui mengalami permasalahan pada uji normalitas setelah dilakukan uji asumsi klasik terhadap model regresi. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan transformasi variable ke dalam bentuk logaritma natural (Log N). Logaritma natural digunakan untuk memperkecil perbedaan selisih angka yang jauh antar variabel penelitian. Rumus yang digunakan dalam transformasi variabel sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Ln (Pendapatan Asli Daerah)}$$

2. Pajak Daerah (PD)

$$\text{Pajak Daerah} = \text{Ln (Pajak Daerah)}$$

3. Retribusi Daerah (RD)

$$\text{Retribusi Daerah} = \text{Ln (Retribusi Daerah)}$$

4. Laba BUMD (LB)

$$\text{Laba BUMD} = \text{Ln (Laba BUMD)}$$

5. Belanja Modal (BM)

$$\text{Belanja Modal} = \text{Ln (Belanja Modal)}$$

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Gambaran fakta pada variabel penelitian yang berasal dari data sampel penelitian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Statistik Deskriptif

	PAD	PAJAK_DAERAH	RETRIBUSI_D AERAH	LABA_BUMD	BELANJA_MO DAL
Mean	433.4659	157.6696	21.80705	19.33029	307.2437
Median	368.3300	108.6100	18.06000	16.55000	278.2100
Maximum	2385.940	1561.700	113.6800	79.65000	1054.760
Minimum	212.7800	35.96000	5.320000	5.810000	102.0800
Std. Dev.	318.6291	235.9247	16.27753	12.40507	154.9286
Skewness	4.711075	5.091801	3.481119	2.718016	1.990702
Kurtosis	26.47346	28.90834	17.40822	11.47561	9.292356
Jarque-Bera	2799.039	3390.396	1120.304	443.5655	242.5733
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	45513.92	16555.31	2289.740	2029.680	32260.59
Sum Sq. Dev.	10558550	5788687.	27555.65	16004.11	2496299.
Observations	105	105	105	105	105

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel diatas menunjukkan bahwa variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilai terendah dimiliki oleh Kota Pekalongan tahun 2019 dengan nilai Rp 212.780.000.000, dan nilai tertinggi dimiliki oleh Kota Semarang tahun 2021 dengan nilai Rp 2.385.940.000.000. Dalam variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dapatkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp

433.465.900.000 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 318.629.100.000 yang berarti bahwa data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean*.

Variable pajak daerah dengan nilai terendah dimiliki oleh Kabupaten Magelang pada tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp 35.960.000.000, dan nilai tertinggi dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp 1.561.700.000.000. Dalam variable pajak daerah didapatkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 157.669.600.000 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 235.924.700.000 yang berarti bahwa data pajak daerah terdapat simpangan yang tidak baik karena nilai standar deviasi lebih besar dari nilai *mean*. Hal ini menunjukkan bahwa data pajak daerah pada penelitian ini terdapat beberapa *outlier* (data yang terlalu ekstrim).

Variable retribusi daerah dengan nilai terendah dimiliki oleh Kabupaten Magelang pada tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp 5.320.000.000, dan nilai tertinggi dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp 113.680.000.000. Dalam variable retribusi daerah didapatkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 21.807.050.000 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 16.277.530.000 yang berarti bahwa data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean*.

Variable laba badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nilai terendah dimiliki oleh Kota Pekalongan pada tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 5.810.000.000, dan nilai tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Blora pada tahun 2020

dengan nilai sebesar Rp 79.650.000.000. Dalam variable laba BUMD didapatkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 19.330.290.000 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 12.405.070.000 yang berarti bahwa data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean*.

Variable belanja modal dengan nilai terendah dimiliki oleh Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp 102.080.000.000, dan nilai tertinggi dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp 1.054.760.000.000. Dalam variable belanja modal didapatkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 307.243.700.000 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 154.928.600.000 yang berarti bahwa data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean*.

4.2.2 Uji Pemilihan Regresi Data Panel

Regresi data panel merupakan gabungan beberapa objek yang memiliki waktu. Pada regresi data panel memiliki tiga metode yaitu CEM, FEM, dan REM. Dari tiga metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan . perlu dilakukan pemilihan model terbaik untuk di regresikan. Berikut merupakan hasil uji pemilihan model:

Table 4.3
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.356182	(34,66)	0.0000
Cross-section Chi-square	105.410981	34	0.0000

Sumber : Data diolah 2023

Karena nilai prob. **0,0000** < **0,05**, maka uji yang cocok adalah FEM (Fixed Effect Model).

Table 4.4
Hasil Uji Haussman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.522321	4	0.0037

Sumber : Data diolah 2023

Karena nilai Prob. **0.0037** < **0,05**, maka uji yang cocok digunakan adalah **FEM (Fixed Effect Model)**. berdasarkan hasil uji Chow dan uji Haussman maka dapat

diambil kesimpulan bahwa model yang tepat untuk pengujian ini adalah FEM (fixed Effect Model).

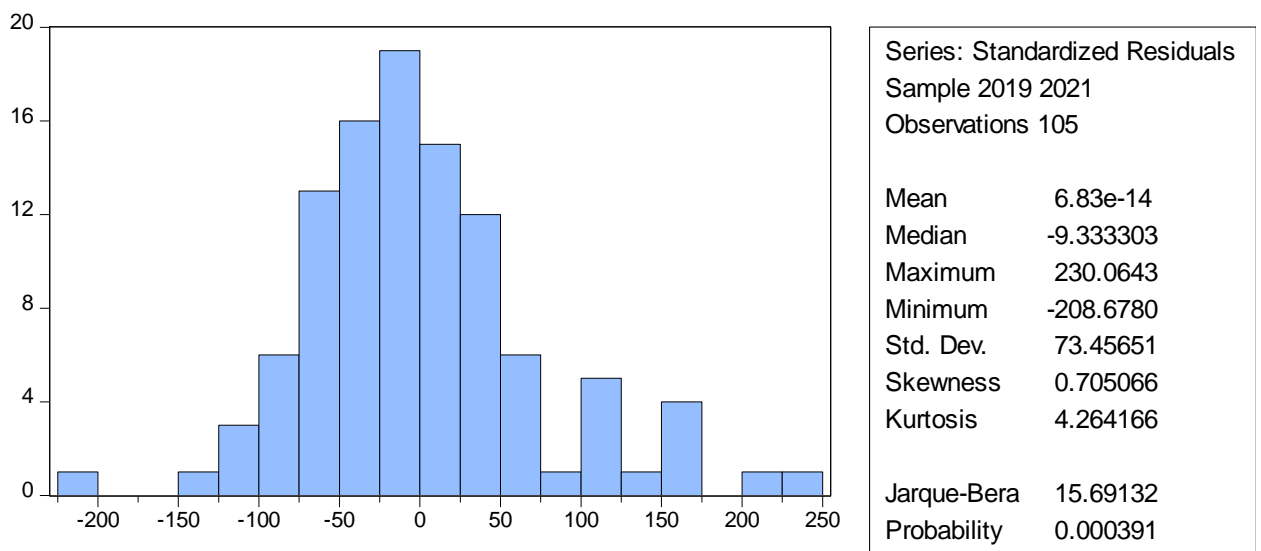
4.2.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang di gunakan berdistribusi normal, hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan uji statistik Jarque-Bera Test. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai dari probabilitasnya lebih dari 5% atau 0,05 ($< 0,05$). Berikut ini merupakan hasil dari uji normalitas dalam penelitian ini:

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas

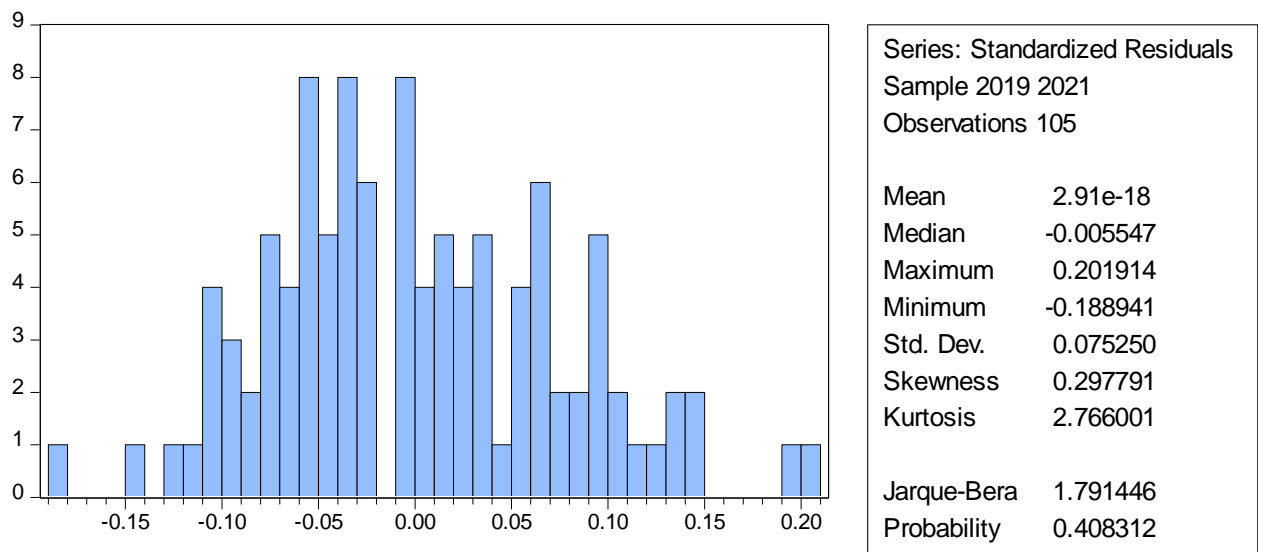


sumber : Data diolah 2023

Pada hasil uji normalitas diatas dapat diketahui bahwa nilai jarque bera sebesar 0,000391 artinya lebih kecil dari 0,05 , sehingga dapat di simpulkan terjadi masalah normalitas, yang berarti bahwa residual data berdistribusi tidak normal. Namun setelah dilakukan perbaikan data dengan cara mentransformasi data (mengubah data dalam bentuk log), diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data diolah 2023

Pada hasil uji normalitas diatas dapat diketahui bahwa nilai jarque bera sebesar 0,408312 artinya lebih dari 0,05, maka dapat di indikasikan bahwa data sudah berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini dilakukan untuk menguji koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen. Berikut hasil uji multikolinieritas:

Tabel 4.5

Hasil Uji Multikolinieritas

	Retribusi_Daerah	Pajak_Daerah	Laba_bumd	Belanja_modal
Retribusi_Daerah	1	0.894373212737 676	0.358499233 8631981	0.67048704432 15282
Pajak_Daerah	0.894373212737 676	1	0.468904357 4808741	0.64461435094 08434
Laba_bumd	0.358499233863 1981	0.468904357480 8741	1	0.42046289138 38171
Belanja_modal	0.670487044321 5282	0.644614350940 8434	0.420462891 3838171	1

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas, koefisien korelasi antara masing-masing variabel $< 0,90$, sehingga tidak terdapat masalah multikolinieritas antara variabel independen. Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah korelasi antara variabel retribusi daerah (X1) dengan variabel pajak daerah (X2), memiliki koefisien korelasi yang hampir mendekati 0,90. Namun, setelah dilakukan transformasi data menjadi log, maka diperoleh hasil uji multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

	LOG_RETRIBU SI	LOG_PAJAK	LOG_LABABU MD	LOG_BELANJA MODAL
LOG_RETRIBU SI	1.000000	0.786304	0.254547	0.502622
LOG_PAJAK	0.786304	1.000000	0.317206	0.477672
LOG_LABABU MD	0.254547	0.317206	1.000000	0.379524
LOG_BELANJ AMODAL	0.502622	0.477672	0.379524	1.000000

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan hasil uji di atas, dapat diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel independen $< 0,90$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bisa diketahui dari nilai probabilitas signifikansinya di setiap variabel. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas:

Table 4.7

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.90858	6.803112	2.485418	0.0146
RETRIBUSI_DAERAH				
AH	-0.835060	0.337559	-2.473821	0.0151
PAJAK_DAERAH	0.102496	0.023428	4.374863	0.0000
LABA_BUMD	0.040490	0.219073	0.184823	0.8537
BELANJA_MODAL	0.055015	0.020825	2.641771	0.0096
R-squared	0.412922	Mean dependent var		32.54451
Adjusted R-squared	0.389439	S.D. dependent var		30.13207
S.E. of regression	23.54471	Akaike info criterion		9.202128
Sum squared resid	55435.36	Schwarz criterion		9.328507
Log likelihood	-478.1117	Hannan-Quinn criter.		9.253339
F-statistic	17.58379	Durbin-Watson stat		1.375187
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari variabel Desentralisasi Fiskal (X1) sebesar 0,0151; (X2) sebesar 0,00000; (X3) sebesar 0,8537; (X4) sebesar 0,0096. Berdasarkan uji Glejser di atas, dapat diketahui nilai prob. Variabel retribusi daerah, pajak daerah, dan belanja modal signifikan pada 0,05 (lebih kecil dari 0,05), sehingga **mengindikasikan terdapat heteroskedastisitas.**

Namun apabila data ditransformasi dan dilakukan uji glejser, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Table 4.8

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-450.7918	144.2167	-3.125795	0.0026
LOG_RETRIBUSI	-9.240020	14.58477	-0.633539	0.5286
LOG_PAJAK	90.70073	29.06681	3.120423	0.0027
LOG_LABABUMD	9.918289	10.77700	0.920320	0.3608
LOG_BELANJAMODAL	9.521563	9.295174	1.024356	0.3094

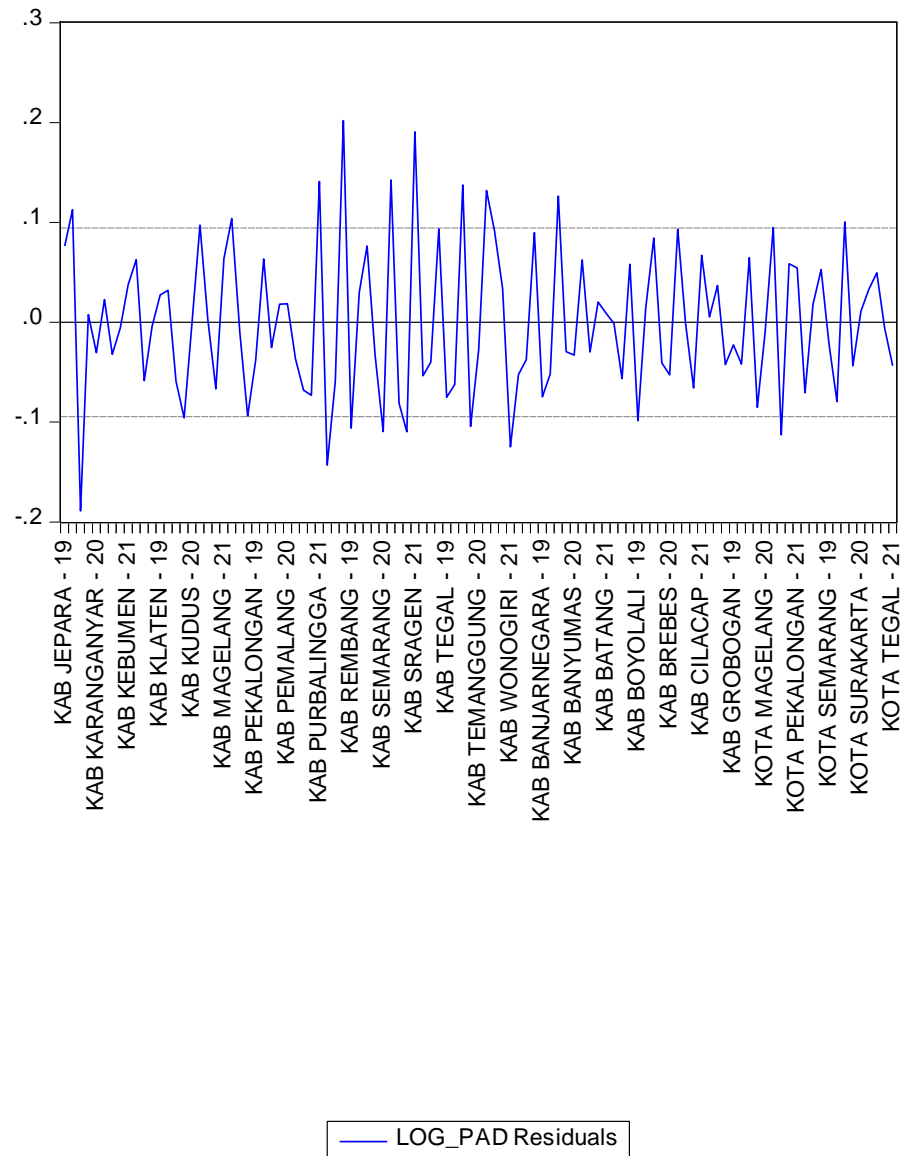
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.735003	Mean dependent var	32.54451
Adjusted R-squared	0.582430	S.D. dependent var	30.13207
S.E. of regression	19.47125	Akaike info criterion	9.054306
Sum squared resid	25022.55	Schwarz criterion	10.04006
Log likelihood	-436.3511	Hannan-Quinn criter.	9.453754
F-statistic	4.817363	Durbin-Watson stat	2.859931

Sumber : Data diolah 2023

masih terjadi heteroskedastisitas pada variabel pajak daerah, karena nilai prob. Lebih kecil dari 0,05. Namun apabila menggunakan grafik residual, diperoleh sebagai berikut :

Grafik 4.1

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan uji grafik residual tersebut, dapat diketahui bahwa titik-titik atau pola menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. (Natoen,

2018)

4.2.4 Uji Ketepatan Model

1. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan sudah tepat atau belum. Berikut ini hasil dari pengujian Uji F:

Tabel 4.9

Hasil Uji F

R-squared	0.946852
Adjusted R-squared	0.944726
S.E. of regression	74.91123
Sum squared resid	561169.3
Log likelihood	-599.6390
F-statistic	445.3817
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data diolah 2023

Karena nilai prob. Dari uji F sebesar $0,0000 < 0,05$, maka variabel independen Retribusi daerah, pajak daerah, laba bumd, dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap PAD.

2. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)

Pengujian Koefisien Determinasi dilakukan karena terdapat lebih dari satu variabel independen yang dapat dilihat melalui Adjusted R-Square. Berikut merupakan hasil dari uji koefisien determinasi:

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.946852	Mean dependent var	433.4659
Adjusted R-squared	0.944726	S.D. dependent var	318.6291
S.E. of regression	74.91123	Akaike info criterion	11.51693
Sum squared resid	561169.3	Schwarz criterion	11.64331
Log likelihood	-599.6390	Hannan-Quinn criter.	11.56814
F-statistic	445.3817	Durbin-Watson stat	0.779948
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, diperoleh nilai Adjusted R-Square 0,946852 (94,68 %) yang menunjukkan bahwa PAD di pengaruhi oleh Retribusi daerah, pajak daerah, laba bumd, dan belanja modal, sedangkan sisanya di pengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.2.5 Analisis Hasil Uji Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini model yang tepat adalah model FEM yang dapat diketahui dari uji chow dan uji haussman. Hasil uji regresi data panel dalam analisis ini memperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 1.83544338629 + 0.890915351785X1 + 0.00921553050854X2 + 0.169784505325X3 - 0.105904141549X4 + e$$

Hasil regresi diatas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (α) sebesar 1,83544338629 menunjukkan bahwa apabila variable independen (X_1, X_2, X_3, X_4) bernilai 0 persen maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1.83544338629 persen.
2. Nilai koefisien regresi variabel Pajak Daerah (β_1) sebesar 0,890915351785 hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Pajak Daerah akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0.890915351785 persen.
3. Nilai dari koefisien variable Retribusi Daerah (β_2) sebesar 0,00921553050854 hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Retribusi Daerah akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0.00921553050854 persen.
4. Nilai koefisien regresi variabel laba badan usaha milik daerah (BUMD) (β_3) sebesar 0,169784505325 hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel laba BUMD akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,169784505325 persen.
5. Nilai koefisien regresi variabel belanja modal (β_4) sebesar 0,105904141549 hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel belanja modal akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,105904141549 persen.

4.2.6 Hasil Uji Hipotesis

Uji Hipotesis menunjukkan bahwa seberapa jauh pengaruh dari variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Table 4.11

Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variable: LOG_PAD
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/02/23 Time: 02:59
 Sample: 2019 2021
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.835443	0.699641	2.623406	0.0108
LOG_RETRIBUSI	0.009216	0.070755	0.130245	0.8968
LOG_PAJAK	0.890915	0.141012	6.317994	0.0000
LOG_LABABUMD	0.169785	0.052283	3.247434	0.0018
LOG_BELANJAMODAL	-0.105904	0.045094	-2.348527	0.0219

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.965147	Mean dependent var	5.958464
Adjusted R-squared	0.945080	S.D. dependent var	0.403076
S.E. of regression	0.094461	Akaike info criterion	-1.602703
Sum squared resid	0.588913	Schwarz criterion	-0.616946
Log likelihood	123.1419	Hannan-Quinn criter.	-1.203255
F-statistic	48.09600	Durbin-Watson stat	2.213710
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah 2023

Dari table 4.9 dapat diketahui bahwa hasil uji hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel Pajak Daerah

Hipotesis pertama (H1) yaitu pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas didapatkan nilai dari t hitung sebesar 6,317994 dan tingkat signifikansinya

sebesar 0,0000 ($p < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan dengan demikian maka hipotesis pertama (H1) diterima.

2. Variabel Retribusi Daerah

Hipotesis kedua (H2) yaitu retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas didapatkan nilai dari t hitung sebesar 0,130245 dan tingkat signifikansi sebesar 0,8968 ($p > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan dengan demikian maka hipotesis kedua (H2) ditolak.

3. Variabel Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Hipotesis ketiga (H3) yaitu laba badan usaha milik daerah (BUMD) tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas didapatkan nilai t hitung sebesar 3,247434 dan tingkat signifikansi sebesar 0,0018 ($p < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel laba badan usaha milik daerah (BUMD) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Jadi dengan demikian dapat di ketahui bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak.

4. Variabel Belanja Modal

Hipotesis keempat (H4) yaitu belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas didapatkan bahwa nilai t hitung sebesar -2,348527 dan tingkat

signifikansi sebesar 0,0219 ($p < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian maka hipotesis keempat (H4) ditolak.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

4.3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 6,317994 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000 ($p < 0,05$). Sehingga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan secara teori berpengaruh positif. Hal ini dapat diketahui bahwa apabila terjadi kenaikan pajak daerah maka pendapatan asli daerah juga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya apabila pajak daerah mengalami penurunan, maka pendapatan daerah juga akan menurun.

Dalam hal ini *stakeholder* mempunyai peran penting terhadap hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah. Menurut Mardiasmo (2009) *stakeholder* dibagi menjadi dua yaitu *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal. Peran-peran para *stakeholder* sangat mempengaruhi suatu organisasi pemerintahan dalam mencapai kemandirian daerah. Peran yang dimaksud yaitu manajer publik sebagai *stakeholder* internal dan masyarakat pembayar pajak dan pengguna layanan publik sebagai *stakeholder* eksternal. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa *stakeholder teori* dalam pemerintahan dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan

kemandirian daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sumber-sumber PAD yang salah satunya yaitu pajak daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Wirawati (2013), Mentayani, dkk (2014), Putri dan Rahayu (2015), Mabe dan Kuusaana (2015), Marita dan Suardana (2016), Saputri (2019), Sari (2019), Rizki (2021), meiliya (2022) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dalam penelitian ini menyatakan bahwa kontribusi pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021 sebesar 20 persen.

4.3.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 0,130245 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,8968 ($p > 0,05$). Sehingga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021 termasuk kedalam kategori sedang. Retribusi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat juga diwajibkan untuk membayar sesuai ketentuan pemerintah.

Menurut Ghozali dan Chariri (2014) *stakeholder teori* didefinisikan sebagai perusahaan bukan hanya entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri tetapi juga harus memberikan manfaat bagi

stakeholdernya. Jadi antara perusahaan dengan *stakeholder* saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa hasil penelitian tidak sesuai dengan *stakeholder teori* yaitu retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jaa Tengah Tahun 2019-2021.

Dalam hal ini, hasil penelitian sejalan dengan penelitian Zahari (2016) yang menjelaskan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini terjadi karena masih kurangnya realisasi penerimaan retribusi daerah yang disebabkan oleh belum maksimalnya pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga penerimaan retribusi daerah masih kurang berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

4.3.3 Pengaruh Laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 3,247434 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0018 ($p > 0,05$). Sehingga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa laba badan usaha milik daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat diketahui bahwa apabila terjadi kenaikan laba badan usaha milik daerah maka pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan. Sebaliknya apabila terjadi penurunan pada laba badan usaha milik daerah maka pendapatan asli daerah juga akan mengalami penurunan.

Dalam teori *stakeholder* menyatakan hubungan perusahaan dengan *stakeholder* harus saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Sehingga dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dari hasil sebagai pelayan publik. Dengan demikian, suatu organisasi pemerintahan membutuhkan *stakeholder* untuk bisa meningkatkan kemandirian suatu daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba BUMD berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021. Dalam hal ini, BUMD memberikan pelayanan kepada *stakeholder* dan *stakeholder* menerima pelayanan dengan membayar sesuai yang telah ditentukan pemerintah. Pembayaran dari *stakeholder* dikontribusikan kedalam pendapatan asli daerah kemudian digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meiliya (2022) yang menunjukkan bahwa laba badan udaha milik daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dalam penelitian ini menyatakan bahwa kontribusi laba badan udaha milik daerah (BUMD) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021 sebesar 48,57 persen.

4.3.4 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar -2,348527 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0219 ($p < 0,05$). Sehingga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli.

Menurut Ghozali dan Chariri (2014) teori *stakeholder* menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta aset daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, suatu organisasi pemerintahan memberikan fasilitas umum untuk bisa dimanfaatkan oleh stakeholdernya. Dalam mewujudkan kesejahteraan, suatu organisasi pemerintahan membutuhkan peran *stakeholder* untuk bisa menggunakan jasa publik yang hasilnya dikontribusikan untuk pendapatan asli daerah. Dalam hal ini, belanja modal digunakan organisasi pemerintahan untuk melakukan pembangunan fasilitas umum untuk bisa dinikmati oleh para *stakeholder*.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amrozi (2016) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dalam hal ini, belanja modal diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat memberikan apresiasi dalam bentuk pembayaran retribusi pemakaian jasa yang diberikan oleh pemerintah sehingga bisa

meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh belanja modal yang dilakukan belum merata di setiap daerah, sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat belum maksimal dan masyarakat tidak memberikan apresiasinya kepada pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah (BUMD), dan belanja modal terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga apabila pajak daerah mengalami kenaikan maka bisa mempengaruhi nilai pendapatan asli daerah.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini terjadi karena masih kurangnya realisasi penerimaan retribusi daerah yang disebabkan oleh belum maksimalnya pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga penerimaan retribusi daerah masih kurang berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Laba badan usaha milik daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga apabila laba BUMD mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga akan mengalami kenaikan.
4. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini terjadi karena belum meratanya belanja modal yang dilakukan disetiap daerah dan masih terdapat penyalahgunaan belanja modal dalam

realisasinya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini hanya berdasarkan hasil dari analisis data, maka diharapkan pada penelitian yang lebih lanjut untuk bisa memberikan hasil yang lebih lengkap.
2. Kurangnya pengetahuan teori oleh penulis, maka diharapkan pada penelitian yang lebih lanjut dapat mengeksplorasi teori yang lebih banyak lagi.
3. Keterbatasan penelitian dalam mendapatkan literatur penelitian sebelumnya sehingga masih banyak kelemahan dalam penelitian ini baik dari segi hasil penelitian maupun hasil analisisnya.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu :

1. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan bias menambahkan variable lain sebagai variable independen. Variabel independen dalam penelitian ini belum mampu menjelaskan variable dependen secara lebih luas.

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan bias memperluas lagi wilayah penelitian, sehingga dapat dilihat perbandingan besarnya pendapatan asli daerah antara satu provinsi dengan provinsi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrozi, A. I. (2016). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur) . *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 1-12.
- Andirfa, M. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Syiah Kuala*, 30-38.
- Darmawis, R. S. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 183-199.
- Fitriana. (2014). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bontang. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 1875-1888.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2014). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, L. (2020). Analysis of Potential Local Government Revenue Sources Towards B Local Government Revenue (PAD) of Balikpapan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Visioner*, 1607-1620.
- Indriantoro, N. (1999). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen (Ed. Ke-1)*. Yogyakarta: BPFE.
- Kusuma, K. A. (2013). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD SeKabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(3), 574-585.
- Mardiasmo. (2001). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- Meiliya, E. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Laba BUMD terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 128-139.
- Natoen, A. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7-15.
- Noerdiawan, d. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Novitasari, M. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 174-186.
- Prakosa, K. P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Ed. Revisi)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Prana, R. R. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilmuan*, 74-86.
- Ririn, T. (2014). Pengaruh Belanja Modal, Investasi, Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 36-55.
- Rostow, D. M. (1996). *Pembangunan Ekonomi Perencanaan Pembangunan. Terjemahan oleh Drs. Benyamin Molan*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Saleh, R. D. (2015). Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah. *Citra Ekonomi Jurnal Ekonomi*, 23-36.
- Sari, W. P. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017). *E-Journal Equilibrium Manajemen*, 12-19.
- Siahaan. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiarto, E. (2016). Analisis Kontribusi Perusahaan Daerah Pasar terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, 166-174.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (3rd ed)*. Bandung: Alfabeta.
- Zahari, M. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Universitas Batanghari*, 133-148.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Jadwal Penelitian

No.	Bulan Kegiatan	Juni				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal			X	X																
2	Konsultasi pembimbing					X															
3	Revisi Proposal												X								
4	Pengumpulan data													X							
5	Analisis Data														X						
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi														X						
7	Pendaftaran Munaqosah															X					
8	Munaqasah																	X			

Lampiran 2

Tabulasi Variabel Dependen dan Independen

KABUPATEN / KOTA	TAHUN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	LABA BUMD	BELANJA MODAL	PAD
		X1	X2	X3	X4	Y
KAB. JEPARA	2019	127,43	21,49	13,37	325,21	384,98
	2020	136,85	18,06	10,95	266,28	419,36
	2021	170,34	22,11	15,98	231,97	408,64
KAB. KARANGANYAR	2019	185,33	10,95	15,28	286,88	387,76
	2020	176,87	13,88	15,26	148,56	384,68
	2021	195	11,09	14,7	193,82	426,65
KAB. KEBUMEN	2019	110,61	27,14	14,21	365,84	409,16
	2020	100,88	22,07	15,73	288,8	403,03
	2021	112,47	23,65	16,55	266,11	472,02
KAB. KENDAL	2019	127,83	23,92	20,05	283,5	350,5
	2020	134,45	20	19,3	108,46	356,75
	2021	163,52	21,73	20,05	141,15	439,2
KAB. KLATEN	2019	125,44	17,3	12,99	308,15	311,65
	2020	116,13	14,76	17,58	157,13	329,96
	2021	126,67	14,41	16,41	189,61	315,3
KAB. KUDUS	2019	125,76	20,06	9,28	278,21	343,82
	2020	126,24	18,49	8,7	221,81	383,89
	2021	148,64	25,98	8,37	155,22	507,17
KAB. MAGELANG	2019	156,89	22,93	23,7	386,53	417,18
	2020	115,53	27,05	30,64	214,41	329,77
	2021	120,9	21,16	26,88	251,16	375,38
KAB. PATI	2019	93,02	22,75	19,07	405,1	364
	2020	97,88	22,5	27,64	315,61	371,71
	2021	108,64	27,19	30,66	271,12	388,64
KAB. PEKALONGAN	2019	78,22	12,81	17,33	345,17	341,34
	2020	74,25	12,73	10,12	241,24	341,9
	2021	83,27	11,27	9,31	208,05	346,6
KAB. PEMALANG	2019	87,62	39,65	20,22	347,66	350,56
	2020	80,57	31,4	21,37	342,59	328,38
	2021	88,73	28,57	22,5	180,05	365,39

KAB. PURBALINGGA	2019	62,23	14,72	20,64	262,14	306
	2020	58,83	11,07	21,68	130,33	313,62
	2021	61,71	12,31	18,44	196,96	377,88
KAB. PURWOREJO	2019	77,65	14,85	13,69	327,41	280,4
	2020	74,19	12,22	14,95	254,02	304,8
	2021	84,23	16,74	14,21	266,46	438,26
KAB. REMBANG	2019	100,7	19,03	10,84	207,07	308,45
	2020	87,54	16,37	11,96	154,12	326,67
	2021	109,96	16,92	10,84	187,29	404,1
KAB. SEMARANG	2019	174,54	34,46	11,19	393,47	429,01
	2020	184,43	30,45	11,02	219,07	442,53
	2021	189,49	27,7	12,3	292	575,75
KAB. SRAGEN	2019	99,97	14	18,99	249,33	368,33
	2020	111,44	13,08	19,99	268,51	394,46
	2021	107,15	13,58	22,25	211,77	537,27
KAB. SUKOHARJO	2019	262,42	19,06	22,65	350,58	458,74
	2020	235,19	16,77	33,76	238,74	469,54
	2021	234,43	18,36	34,78	283,87	528,35
KAB. TEGAL	2019	122,81	25,21	22,4	434,39	436
	2020	125,24	19,29	14,19	248,98	439,93
	2021	143,62	20,91	15,42	368,88	591
KAB. TEMANGGUNG	2019	53,42	16,19	14,57	223,25	278,31
	2020	47,89	8,44	18,8	102,08	307,49
	2021	52,83	9,4	19,63	236	363,13
KAB. WONOGIRI	2019	60,3	24,24	18,14	565,09	287,22
	2020	56,73	18,64	17,99	291,31	274,29
	2021	60,8	15,62	17,33	364,81	241,3
KAB. WONOSOBO	2019	44,75	11,32	19,27	430,77	238,37
	2020	43,41	6,79	20,54	243	251,72
	2021	52,81	11,5	20,38	256,22	339,75
KAB. BANJARNEGARA	2019	60,73	21,46	17,09	358,21	257,7
	2020	55,45	16,59	15,29	348,51	238,64
	2021	58,93	23,29	17,26	294,84	313,83
KAB. BANYUMAS	2019	229,38	32,64	12,91	478,8	686,81
	2020	208,62	23,71	15,8	363,47	668,21
	2021	222,53	23,69	15,51	432,24	761,99

KAB. BATANG	2019	82,57	16,74	14,14	211,78	245,84
	2020	80,13	15,82	13,23	152,87	257,42
	2021	108,44	16,16	12,77	196,08	322,79
KAB. BLORA	2019	61,32	9,27	13,81	466,89	246,86
	2020	56,12	9,16	79,65	349,06	299,69
	2021	55,01	10,49	67,49	298,44	326,77
KAB. BOYOLALI	2019	149,67	21,09	13,97	530,59	395,43
	2020	140,73	17,1	18,54	405,11	451,54
	2021	151,27	22,65	18,99	443,85	514,97
KAB. BREBES	2019	112,68	13,22	7,23	621,92	379,09
	2020	108,61	15,47	9,14	432,56	392,54
	2021	124,43	16,11	9,84	439,32	518,51
KAB. CILACAP	2019	209,48	44,74	26,19	663,32	574,28
	2020	203,19	18,97	44,68	462,43	591,34
	2021	221,38	18,62	56,11	583,82	739,13
KAB. DEMAK	2019	156,47	42,54	18,25	455,48	407,4
	2020	152,91	27,26	20,58	286,91	439,69
	2021	165,78	24,23	22,85	279,92	445,01
KAB. GROBOGAN	2019	95,73	15,51	22,07	448,67	344,56
	2020	96,14	14,06	22,51	338,71	350,45
	2021	101,76	11,5	25,24	290,18	424,19
KOTA MAGELANG	2019	40,43	6,94	9,1	272,06	273,58
	2020	35,96	5,32	9,22	116,56	290,76
	2021	38,09	6,26	8,5	186,01	319,39
KOTA PEKALONGAN	2019	87,58	16,67	6,1	182,15	212,78
	2020	76,26	14,87	5,82	126,93	229,87
	2021	87,38	14,75	5,81	160,51	252,04
KOTA SALATIGA	2019	66,37	11,03	15,93	183,72	236,09
	2020	54,37	9,3	17,1	174,13	219,54
	2021	65,04	14,98	18,82	130,28	280,68
KOTA SEMARANG	2019	1561,7	113,68	41,24	1054,76	2066,33
	2020	1425,7	88,68	53,34	506,42	2024,54
	2021	1445,17	96,45	66,9	953,67	2385,94
KOTA SURAKARTA	2019	360,05	55,29	13,35	543,58	546,02
	2020	279,27	46,51	12,5	250,97	492,78
	2021	315,92	51,53	14,81	341,1	560,58

KOTA TEGAL	2019	89,36	19,09	8,58	165,98	285,58
	2020	82,96	17,72	10,94	148,14	266,58
	2021	97,55	22,24	13,44	146,32	308,12

Lampiran 3

A. HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

	PAD	PAJAK_DAERAH	RETRIBUSI_D AERAH	LABA_BUMD	BELANJA_MO DAL
Mean	433.4659	157.6696	21.80705	19.33029	307.2437
Median	368.3300	108.6100	18.06000	16.55000	278.2100
Maximum	2385.940	1561.700	113.6800	79.65000	1054.760
Minimum	212.7800	35.96000	5.320000	5.810000	102.0800
Std. Dev.	318.6291	235.9247	16.27753	12.40507	154.9286
Skewness	4.711075	5.091801	3.481119	2.718016	1.990702
Kurtosis	26.47346	28.90834	17.40822	11.47561	9.292356
Jarque-Bera	2799.039	3390.396	1120.304	443.5655	242.5733
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	45513.92	16555.31	2289.740	2029.680	32260.59
Sum Sq. Dev.	10558550	5788687.	27555.65	16004.11	2496299.
Observations	105	105	105	105	105

B. HASIL UJI PEMILIHAN MODEL**1. HASIL UJI CHOW**

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.356182	(34,66)	0.0000
Cross-section Chi-square	105.410981	34	0.0000

Karena nilai prob. **0,0000** < **0,05**, maka uji yang cocok adalah FEM (Fixed Effect Model)

2. HASIL UJI HAUSSMAN

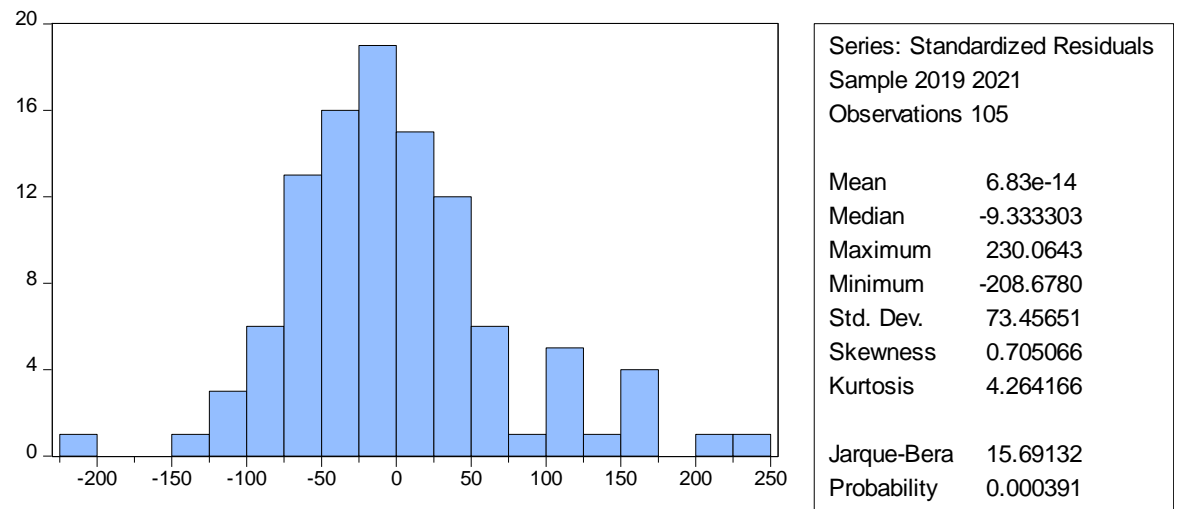
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.522321	4	0.0037

Karena nilai Prob. **0.0037** < **0,05**, maka uji yang cocok digunakan adalah **FEM (Fixed Effect Model)**

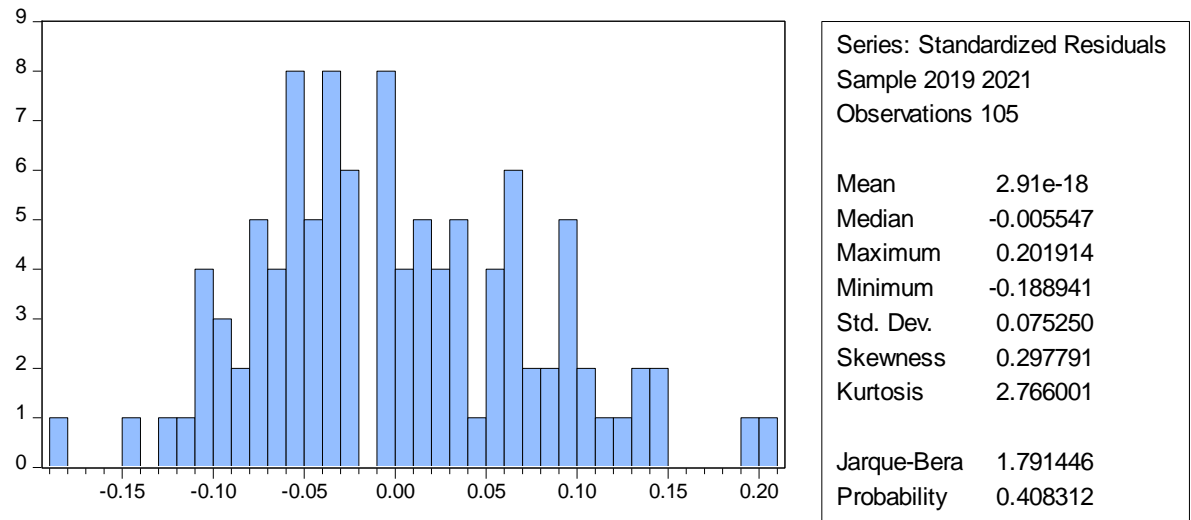
3. UJI ASUMSI KLASIK

a. Uji Normalitas



Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, terlihat bahwa nilai Prob. Jarque Bera sebesar **0,000391** < **0,05**, sehingga dapat disimpulkan terjadi masalah normalitas, yang berarti bahwa residual data berdistribusi **tidak normal**.

NAMUN, setelah dilakukan perbaikan data, dengan cara mentransformasi data (mengubah data dalam bentuk log), diperoleh hasil sebagai berikut:



berdasarkan hasil uji normalitas di atas, dapat diketahui bahwa nilai Prob.

Dari uji Jarque Bera adalah **0,408312** > **0,05**, maka dapat di indikasikan

bahwa **data sudah berdistribusi normal**.

b. Uji Multikolinearitas

	Retribusi_Daerah	Pajak_Daerah	Laba_bumd	Belanja_modal
Retribusi_Daerah	1	0.894373212737676	0.3584992338631981	0.6704870443215282
Pajak_Daerah	0.894373212737676	1	0.4689043574808741	0.6446143509408434
Laba_bumd	0.3584992338631981	0.4689043574808741	1	0.4204628913838171
Belanja_modal	0.6704870443215282	0.6446143509408434	0.4204628913838171	1

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, koefisien korelasi antara masing-masing variabel < 0,90, sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas antara variabel independen. Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah korelasi antara variabel retribusi daerah (X1) dengan variabel pajak daerah (X2), memiliki koefisien korelasi yang hampir mendekati 0,90. **NAMUN**, setelah dilakukan transformasi data menjadi log, maka dieproleh hasil uji multikolinearitas sebagai berikut:

	LOG_RETRIBU SI	LOG_PAJAK	LOG_LABABU MD	LOG_BELANJA MODAL
LOG_RETRIBU SI	1.000000	0.786304	0.254547	0.502622
LOG_PAJAK	0.786304	1.000000	0.317206	0.477672
LOG_LABABU MD	0.254547	0.317206	1.000000	0.379524
LOG_BELANJ AMODAL	0.502622	0.477672	0.379524	1.000000

berdasarkan hasil uji di atas, dapat diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel independen $< 0,90$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
Method: Panel Least Squares
Date: 01/02/23 Time: 02:01
Sample: 2019 2021
Periods included: 3
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.90858	6.803112	2.485418	0.0146
RETRIBUSI_DAERAH	-0.835060	0.337559	-2.473821	0.0151
PAJAK_DAERAH	0.102496	0.023428	4.374863	0.0000
LABA_BUMD	0.040490	0.219073	0.184823	0.8537
BELANJA_MODAL	0.055015	0.020825	2.641771	0.0096
R-squared	0.412922	Mean dependent var		32.54451
Adjusted R-squared	0.389439	S.D. dependent var		30.13207
S.E. of regression	23.54471	Akaike info criterion		9.202128
Sum squared resid	55435.36	Schwarz criterion		9.328507
Log likelihood	-478.1117	Hannan-Quinn criter.		9.253339
F-statistic	17.58379	Durbin-Watson stat		1.375187
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan uji Glejser di atas, dapat diketahui nilai prob. Variabel retribusi daerah, pajak daerah, dan belanja modal signifikan pada 0,05 (lebih kecil dari 0,05), sehingga

mengindikasikan terdapat heteroskedastisitas. Namun, apabila data ditransformasi, dan dilakukan uji glejser, diperoleh hasil sebagai berikut:

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/02/23 Time: 02:53
 Sample: 2019 2021
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-450.7918	144.2167	-3.125795	0.0026
LOG_RETRIBUSI	-9.240020	14.58477	-0.633539	0.5286
LOG_PAJAK	90.70073	29.06681	3.120423	0.0027
LOG_LABABUMD	9.918289	10.77700	0.920320	0.3608
LOG_BELANJAMODAL	9.521563	9.295174	1.024356	0.3094

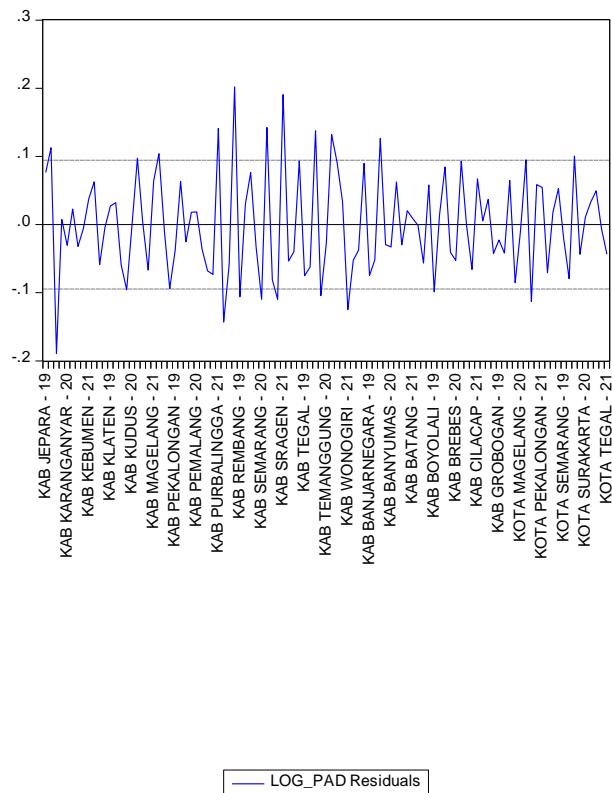
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.735003	Mean dependent var	32.54451
Adjusted R-squared	0.582430	S.D. dependent var	30.13207
S.E. of regression	19.47125	Akaike info criterion	9.054306
Sum squared resid	25022.55	Schwarz criterion	10.04006
Log likelihood	-436.3511	Hannan-Quinn criter.	9.453754
F-statistic	4.817363	Durbin-Watson stat	2.859931

masih terjadi heteroskedastisitas pada variabel pajak daerah, karena nilai prob.

Lebih kecil dari 0,05. Namun, apabila menggunakan grafik residual, diperoleh sebagai berikut



Berdasarkan uji grafik residual tersebut, nilai residual dari masing-masing variabel independen antara berada jauh pada rentang -500 sampai dengan 500, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

C. ANALISIS REGRESI DATA PANEL (SEBELUM TRANSFORMASI DATA)

1. Persamaan Regresi Data Panel

$$\text{PAD} = 177.657609359 - 1.31695902907 * \text{RETRIBUSI_DAERAH} + 1.27800166958 * \text{PAJAK_DAERAH} + 1.34617916557 * \text{LABA_BUMD} + 0.185530953876 * \text{BELANJA_MODAL}$$

2. Uji Hipotesis

Dependent Variable: PAD
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/02/23 Time: 01:06
 Sample: 2019 2021
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	177.6576	21.64518	8.207722	0.0000
RETRIBUSI_DAERAH	-1.316959	1.073997	-1.226222	0.2230
PAJAK_DAERAH	1.278002	0.074541	17.14494	0.0000
LABA_BUMD	1.346179	0.697016	1.931346	0.0563
BELANJA_MODAL	0.185531	0.066258	2.800128	0.0061
R-squared	0.946852	Mean dependent var		433.4659
Adjusted R-squared	0.944726	S.D. dependent var		318.6291
S.E. of regression	74.91123	Akaike info criterion		11.51693
Sum squared resid	561169.3	Schwarz criterion		11.64331
Log likelihood	-599.6390	Hannan-Quinn criter.		11.56814
F-statistic	445.3817	Durbin-Watson stat		0.779948
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas, dapat diketahui bahwa variabel Retribusi Daerah (X1) tidak berpengaruh terhadap PAD, karena nilai prob. $0,2230 > 0,05$.

3. Uji F

R-squared	0.946852
Adjusted R-squared	0.944726
S.E. of regression	74.91123
Sum squared resid	561169.3
Log likelihood	-599.6390
F-statistic	445.3817
Prob(F-statistic)	0.000000

Karena nilai prob. Dari uji F sebesar $0,0000 < 0,05$, maka variabel independen Retribusi daerah, pajak daerah, laba bumd, dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap PAD.

4. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)

R-squared	0.946852	Mean dependent var	433.4659
Adjusted R-squared	0.944726	S.D. dependent var	318.6291
S.E. of regression	74.91123	Akaike info criterion	11.51693
Sum squared resid	561169.3	Schwarz criterion	11.64331
Log likelihood	-599.6390	Hannan-Quinn criter.	11.56814
F-statistic	445.3817	Durbin-Watson stat	0.779948
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, diperoleh nilai Adjusted R-Square 0,946852 (94,68 %) yang menunjukkan bahwa PAD di pengaruhi oleh Retribusi daerah, pajak daerah, laba bumd, dan belanja modal, sedangkan sisanya di pengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

D. ANALISIS REGRESI DATA PANEL SETELAH TRANSFORMASI DATA (LOG)

1. Persamaan Regresi

$$\text{LOG_PAD} = 1.83544338629 + 0.00921553050854*\text{LOG_RETRIBUSI} + 0.890915351785*\text{LOG_PAJAK} + 0.169784505325*\text{LOG_LABABUMD} - 0.105904141549*\text{LOG_BELANJAMODAL} + [\text{CX}=\text{F}]$$

2. Uji Hipotesis

Dependent Variable: LOG_PAD
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/02/23 Time: 02:59
 Sample: 2019 2021
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.835443	0.699641	2.623406	0.0108
LOG_RETRIBUSI	0.009216	0.070755	0.130245	0.8968
LOG_PAJAK	0.890915	0.141012	6.317994	0.0000
LOG_LABABUMD	0.169785	0.052283	3.247434	0.0018
LOG_BELANJAMODAL	-0.105904	0.045094	-2.348527	0.0219

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.965147	Mean dependent var	5.958464
Adjusted R-squared	0.945080	S.D. dependent var	0.403076
S.E. of regression	0.094461	Akaike info criterion	-1.602703
Sum squared resid	0.588913	Schwarz criterion	-0.616946
Log likelihood	123.1419	Hannan-Quinn criter.	-1.203255
F-statistic	48.09600	Durbin-Watson stat	2.213710
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD
2. Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD
3. Laba BUMD berpengaruh positif signifikan terhadap PAD
4. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD

3. UJI F

R-squared	0.965147	Mean dependent var	5.958464
Adjusted R-squared	0.945080	S.D. dependent var	0.403076
S.E. of regression	0.094461	Akaike info criterion	-1.602703
Sum squared resid	0.588913	Schwarz criterion	-0.616946
Log likelihood	123.1419	Hannan-Quinn criter.	-1.203255
F-statistic	48.09600	Durbin-Watson stat	2.213710
Prob(F-statistic)	0.000000		

Prob. F Statistic lebih kecil dari 0,05, maka variabel Retribusi daerah, pajak daerah, laba bumd, dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap PAD.

4. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.965147	Mean dependent var	5.958464
Adjusted R-squared	0.945080	S.D. dependent var	0.403076
S.E. of regression	0.094461	Akaike info criterion	-1.602703
Sum squared resid	0.588913	Schwarz criterion	-0.616946
Log likelihood	123.1419	Hannan-Quinn criter.	-1.203255
F-statistic	48.09600	Durbin-Watson stat	2.213710
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, diperoleh nilai Adjusted R-Square 0,945080 (94,50 %) yang menunjukkan bahwa PAD di pengaruhi oleh Retribusi daerah, pajak daerah, laba bumd, dan belanja modal, sedangkan sisanya di pengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 782336 Fax (0271) 782336 Website: iain-surakarta.ac.id. – Email: info@iain-surakarta.ac.id.

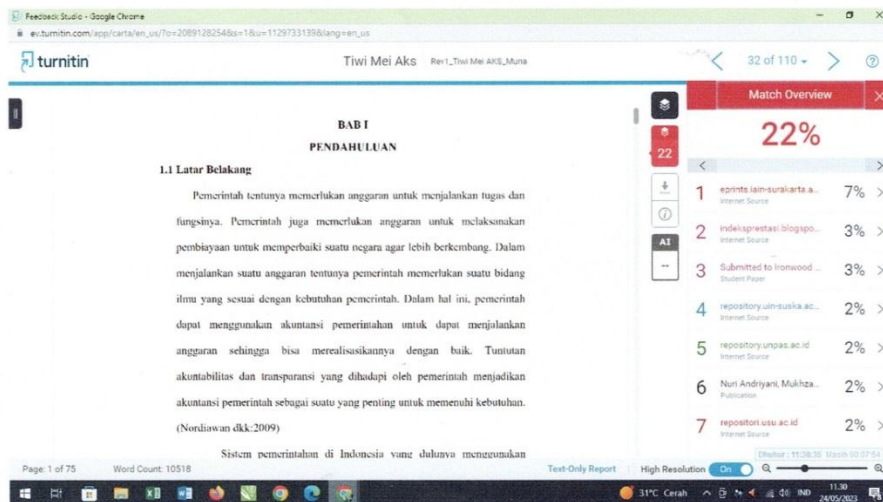
SURAT KETERANGAN TURNITIN

Setelah melakukan tes uji *similarity*, menerangkan bawah mahasiswa di bawah ini:

Nama : Tiwi Mei Listyowati
 NIM : 165221014
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Paper ID : 20891282541
 Date : 10-05-2023
 Hasil menunjukkan SIMILARITY INDEX : 22 %

Sukoharjo, 24 Mei 2023

 Farah Nilawati, S.Sos.I
 NIK.198906072018102003



The screenshot shows the Turnitin interface for a document titled "BAB I PENDAHULUAN". The similarity index is 22%. The document content includes the following text:

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah tentunya memerlukan anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Pemerintah juga memerlukan anggaran untuk melaksanakan pembiayaan untuk memperbaiki suatu negara agar lebih berkembang. Dalam menjalankan suatu anggaran tentunya pemerintah memerlukan suatu bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah dapat menggunakan akuntansi pemerintahan untuk dapat menjalankan anggaran sehingga bisa merealisasikannya dengan baik. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang dihadapi oleh pemerintah menjadikan akuntansi pemerintah sebagai suatu yang penting untuk memenuhi kebutuhan. (Nordiswan dkk:2009)

Sistem pemerintahan di Indonesia yang dahulu menggunakan

The right sidebar shows a "Match Overview" table with the following entries:

Match Number	Source	Similarity Percentage
1	eprints iain-surakarta a... Internet Source	7%
2	indeksprestasi bibliopo... Internet Source	3%
3	Submitted to Ironwood... Student Paper	3%
4	repository.uinsuska.ac... Internet Source	2%
5	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
6	Nuri Andriyani, Mukhta... Publication	2%
7	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%

Lampiran 5

Daftar Riwayat Hidup

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Tiwi Mei Listyowati

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 29 Mei 1998

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Krendowahono Rt 01 Rw 03, Gondangrejo, Kra

No. Hp : 085292363341

E-mail : tiwimei061@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SMP Negeri 01 Gondangrejo
2. SMA Negeri Gondangrejo
3. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam